



PHINISI

JURNAL ILMIAH PERIKANAN & KELAUTAN

Jumardin

Efektivitas Penerapan Marpol Pada Kapal-Kapal Di Pelabuhan Pantoloan

Didin Alfiani, Samsul Bahri, Samsuddin, Uswatunnisah

Studi Perancangan Perpustakaan Modern Berbasis (E-Librar Pada Kampus 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (Studi Komparasi Perpustakaan Nasional Dan Perpustakaan

Arlizar Djamaan, Jumardin, Welem Ada', Bustamin

Kajian Tingkat Kesesuaian Persyaratan Sesuai Dengan Sola: Pada Kapal-Kapal Penumpang Yang Berlayar Di Selat Makas

Muhammad Riza Anugerah Nasir

Studi Terhadap Daya Mesin Kapal Tunda Tb. Bosowa X Deng Penggunaan Kort Nozzle Propeller

Zainal Yahya Idris

Pengembangan Pegawai Berijasah Keahlian Kepelautan

KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX SULAWESI

Jurnal
Phinisi

Vol. 13

No. 1

Hal. 1-58

Makassar
April 2018

ISSN : 1907-6908

JURNAL PHINISI

Vol. 13 Edisi 1 April 2018

DAFTAR ISI

Efektivitas Penerapan Marpol Pada Kapal-Kapal Di Pelabuhan Pantoloan <i>Jumardin</i>	1-8
Studi Perancangan Perpustakaan Modern Berbasis (<i>E-Library</i>) Pada Kampus 2 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (Studi Komperasi Perpustakaan Nasional Dan Perpustakaan IPC) <i>Didin Alfiani, Samsul Bahri, Samsuddin, Uswatunnisah</i>	9-18
Kajian Tingkat Kesesuaian Persyaratan Sesuai Dengan Solas Pada Kapal-Kapal Penumpang Yang Berlayar Di Selat Makassar <i>Arizar Djamaan, Jumardin, Welem Ada', Bustamin</i>	19-28
Studi Terhadap Daya Mesin Kapal Tunda Tb. Bosowa X Dengan Penggunaan Kort Nozzle Propeller <i>Muhammad Riza Anugerah Natsir</i>	29-37
Pengembangan Pegawai Berijazah Keahlian Kepelautan <i>Zainal Yahya Idris</i>	38-56

EFEKTIVITAS PENERAPAN MARPOL PADA KAPAL-KAPAL DI PELABUHAN PANTOLOAN

Jumardin

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Abstract

The effects of garbage disposal at sea bring huge losses to countries where most of the area is waters. Damage to marine ecosystems makes marine productivity unbalanced resulting in many marine biota damaged and / or dead, this also adversely affects the welfare of fishermen. The amount of marine pollution that occurs makes countries trying to overcome waste contamination at sea. The purpose of this study is to know and explain the international provisions governing the prevention of waste pollution by ships and their implementation in Indonesian legislation. This type of research is normative juridical with descriptive research type. The data used are primary and secondary data, while the data collection method used is literature study by identifying, classifying and arranging systematically to draw conclusions. The results show that the regulation on the prevention of marine pollution caused by ships so that the IMO (international maritime organization), issued regulations defined in MARPOL (Marine Pollution) 73/78 Annex V About 'Pollution Prevention by Garbage' which requires Garbage Management Plan or Procedure of Waste Management on board with the intention of providing a systematic course of implementation and control of the ship's waste which has been regulated in MARPOL Annex V. Has published in detail and clearly the prevention efforts of pollution can be done well by each country, in the Republic Act Indonesia No. 16 of 2008 on Shipping and Government Regulation Number 19 Year 1999 on Pollution Control and / or Damage in the Indonesian Sea also contains several similar provisions. Based on international regulations and Indonesian national legal regulations are appropriate but in the implementation in the field each ship company has not carefully examined every completeness and condition of the ship resulting in several accidents resulting in damage and loss, which in turn will lead to contamination.

Keywords: prevention of waste pollution, ship, sea, implementation

Abstrak

Efek pembuangan sampah di laut membawa kerugian yang sangat besar bagi negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Kerusakan ekosistem di laut membuat produktivitas laut menjadi tidak seimbang sehingga banyak biota laut yang rusak dan/atau mati, ini juga berdampak buruk terhadap kesejahteraan nelayan. Banyaknya pencemaran laut yang terjadi membuat negara-negara berupaya untuk mengatasi pencemaran sampah di laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur pencegahan pencemaran sampah yang dilakukan oleh kapal laut dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menyusun secara sistematis untuk menarik simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang pencegahan pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal sehingga IMO (*international maritime organization*), mengeluarkan peraturan-peraturan yang ditegaskan di dalam MARPOL (*Marine Pollution*) 73/78 Annex V Tentang 'Pencegahan Pencemaran Oleh Sampah' yang mempersyaratkan *Garbage Management Plan* atau Prosedur Penanganan Sampah di kapal dengan maksud menyediakan sebuah sistematis jalannya pelaksanaan dan kontrol dari sampah di kapal yang telah diatur dalam MARPOL Annex V. Telah memuat secara rinci dan jelas upaya pencegahan pencemaran bisa dilakukan dengan baik oleh setiap negara, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan di Laut Indonesia juga memuat beberapa ketentuan yang sama. Berdasarkan peraturan internasional dan peraturan hukum nasional Indonesia sudah sesuai namun dalam pelaksanaannya di lapangan setiap perusahaan kapal belum dengan teliti memeriksa setiap kelengkapan dan kondisi kapal sehingga terjadi beberapa kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian, yang pada gilirannya akan menimbulkan pencemaran.

Kata kunci : *pencegahan pencemaran sampah, kapal, laut, implementasi*

PENDAHULUAN

Banyaknya pencemaran di laut oleh sampah dari kapal sehingga IMO (*International Maritime Organization*) mengeluarkan peraturan-peraturan yang ditegaskan di dalam MARPOL (*Marine Pollution*) 73/78 Annex V Tentang 'Pencegahan Pencemaran oleh Sampah' yang mempersyaratkan *Garbage Management Plan* atau Prosedur Penanganan Sampah di kapal dengan maksud menyediakan sebuah sistematis jalannya pelaksanaan dan kontrol dari sampah di atas kapal yang telah diatur dalam MARPOL Annex V.

Untuk mengurangi pencemaran sampah oleh kapal di laut, diperlukan pengetahuan dan kemampuan serta tanggung jawab dari seluruh kru kapal dalam hal tersebut. Antara lain mengikuti aturan-aturan dan prosedur-prosedur tentang pembuangan sampah serta penggunaan peralatan dan fasilitas-fasilitas lain di atas kapal yang digunakan dalam menangani sampah di atas kapal.

Berdasarkan dari uraian di atas maka tim kami mengambil judul Penelitian "Bagaimana Efektivitas Penerapan Marpol pada Kapal-Kapal di Pelabuhan Pantoloan"

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat efektivitas penanganan sampah di kapal

Definisi dan Pengertian Pencemaran Laut

Menurut konvensi hukum laut III (1982) pengertian pencemaran laut adalah perubahan dalam lingkungan laut termasuk muara sungai (*estuaries*) yang menimbulkan akibat buruk sehingga dapat merugikan terhadap sumber daya laut hayati (*Marine Living Resources*),

Definisi Sampah

Menurut MARPOL 73/78 (edisi 2002) Annex V, sampah adalah semua jenis sisa makanan, bahan-bahan buangan rumah tangga tetapi tidak termasuk ikan segar dan bagian-bagiannya yang terjadi selama pengoperasian normal kapal dan ada keharusan untuk disingkirkan dan dibersihkan secara terus-menerus atau secara berkala.

Komponen – Komponen Pencemaran Air Laut Dari Kapal

Komponen-Komponen pencemaran air laut dari kapal dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bahan buangan cairan berminyak.
2. Bahan buangan olahan makanan.
3. Bahan buangan padat.
4. Bahan buangan organik.
5. Bahan buangan anorganik.

Sumber- Sumber Sampah

Sumber sampah dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu :

- a. Sampah Domestik
- b. Sampah Non Domestik

Jenis – Jenis Sampah

- a. Sampah perawatan
- b. Sampah makanan
- c. Sampah plastik
- d. Sampah muatan
- e. Sampah operasional.

Persyaratan Khusus Untuk Pembuangan Sampah

a. Pembuangan sampah di luar daerah khusus :

Ketentuan annex V peraturan 3 menyatakan bahwa :

- 1) Pembuangan ke laut semua barang plastik. Termasuk tali-tali, sintesis, jaring-jaring ikan sintesis dan kantong-kantong sampah plastik dilarang.

2) Pembuangan ke laut sampah-sampah berikut ini harus dilakukan di tempat yang sejauh mungkin dari daratan yang terdekat tetapi dalam keadaan yang bagaimanapun dalam kegiatan yang bagaimanapun ke laut itu dilarang jika jarak dari daratan kurang dari :

- a) 25 mil laut untuk bahan-bahan pelapis dan bahan kemasan yang dapat mengapung.
- b) 12 mil laut untuk sisa-sisa makanan dan semua sampah yang termasuk hasil-hasil olahan kertas, majun, kaca, logam, botol-botol, tembikar dan sampah yang serupa.

2. Pembuangan sampah dalam daerah khusus

Menurut Annex V peraturan 5, Daerah khusus (*Special Area*) adalah :

- a. Daerah laut Tengah

- b. Daerah laut Baltik
- c. Daerah laut Hitam
- d. Daerah laut merah

Sampah berarti sesuatu hal karena kebutuhan sudah tidak digunakan dan perlu dibuang. Kategori sampah yang dimaksud adalah :

- a. Plastik
- b. Material kemasan
- c. Produk yang bahan baku kertas, gelas, botol dan logam.
- d. Kertas
- e. Makanan
- f. Hasil incinerator

Prosedur Penanganan Dan Penanggulangan Sampah

- a. Penanganan dan penanggulangan
- b. Prosedur penanganan sampah
 - 1) Pengumpulan
 - 2) Pengolahan
 - 3) Penampungan
 - 4) Pembuangan

Tabel 2-0-1 Waktu Objek Terurai di Laut

Nama Objek	Waktu yang dibutuhkan dapat terurai	Untuk keterangan
Kertas tiket	2 – 4 minggu	Terurai
Pakaian	1 – 5 minggu	Terurai
Tali	3 – 14 minggu	Terurai
Pakaian Wol	1 tahun	Terurai
Kayu yang di cat	13 tahun	Terurai
Kaleng	100 tahun	Terurai
Kaleng Almunium	200 – 500 tahun	Terurai
Botol plastik	450 tahun	Terurai

Sumber : ABS Garbage Management.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di atas kapal MT. Asphalt Abadi dan MV. Sendang Mas yang sedang berlabuh di Pelabuhan Pantoloan, Sulawesi Tengah. Adapun waktu penelitian yaitu selama 1 bulan,

Objek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah partisipasi awak kapal dalam menerapkan pengelolaan sampah di atas kapal.

Subjek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi, pelaksanaan partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh.

Populasi dan Sampel

Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Penelitian sampel. Kru kapal yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah

sebagian kru kapal yang terdiri dari Mualim I, Mualim II, Mualim III, Mualim IV, Bosun, AB I, AB II, AB III, AB IV, Kelasi, Koki, dan Pelayan.

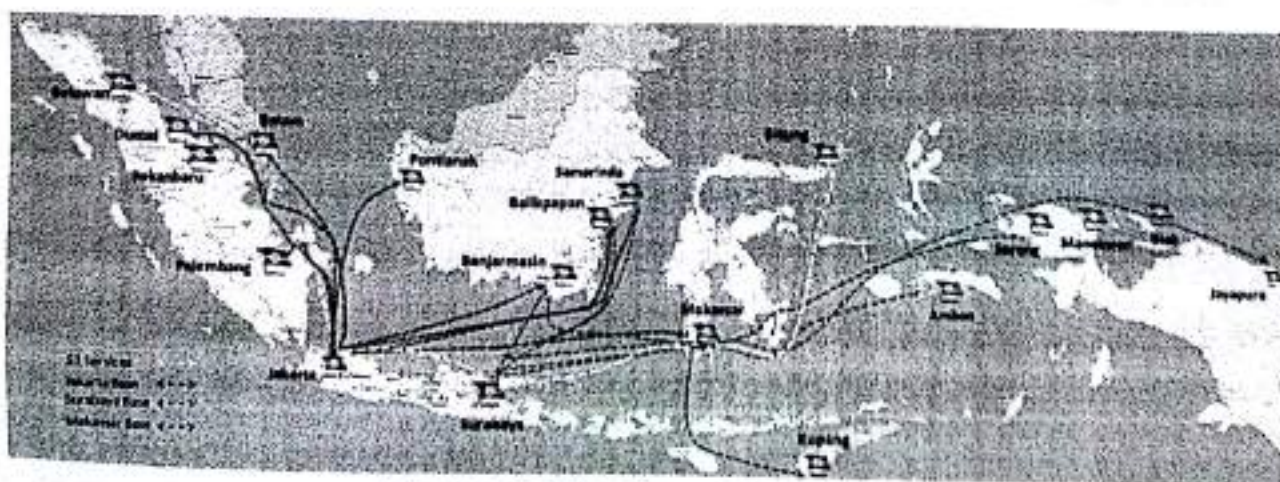
PEMBAHASAN

Pelabuhan Pantoloan

Pelabuhan Pantoloan adalah sebuah pelabuhan yang terdapat di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Secara administratif, Pelabuhan Pantoloan termasuk ke dalam Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Status Pelabuhan Pantoloan merupakan pelabuhan yang diusahakan, dalam segi pengusahaannya dikelola oleh PT. (Persero) Pelindo IV Cabang Pantoloan sedangkan dari segi pemerintahannya dilaksanakan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Pantoloan.

Fasilitas

- a. Terminal Penumpang
- b. Dermaga Penumpang
- c. Dermaga Peti Kemas / Kargo
- d. Kantor Pelindo IV
- e. Halaman Parkir



Gambar 4-0-1 Jaringan Temas Line

M.V. Sendang Mas (Temas Line)

A. Layanan

TEMASLINE menyediakan *one stop service* dalam memberikan pelayanan logistik kepada para pelanggan di seluruh kepulauan Indonesia. Selain jasa transportasi laut, pelayanan lainnya yang disediakan oleh TEMASLINE antara lain *Shipping Management*, jasa keagenan, aktivitas bongkar muat di pelabuhan, manajemen depo, dan pelayanan logistik.

B. Kapal

Bersertifikat kapal kontainer menjamin aman, efisien dan polusi operasi bebas adalah

sesuai dengan aturan internasional dan praktik standart, menunjukkan kemampuan kami sebagai perusahaan pelayaran yang kredibel. Dengan 31 armada kapal, dan pasokan kontainer berjumlah lebih dari 29.000 TEUs

Pelayaran Nasional Indonesia

Peta rute kapal Pelni

Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) adalah maskapai pelayaran nasional Indonesia. Pelni mengoperasikan sejumlah 28 unit kapal penumpang dengan kapasitas seluruhnya 36.913 penumpang dan 4 unit kapal barang.

Ship Garbage Management Plan

Tabel 4-0-1 Penanganan Sampah MT. Asphalt Abadi

NO	KATEGORI SAMPAH	TEMPAT PENAMPUNGAN				KET
		Biru	Merah	Hijau	Abu-Abu	
1	Plastic				✓	
2	Food Waste	✓				
3	Domestic Waste		✓			
4	Cooking oil			✓		
5	Incinerator Ashes					✓
6	Operational wastes					✓
7	Cargo residues					✓
8	Animal Carcass (es)					✓
9	Fishing gear					✓

Tabel 4-0-2 MARPOL 73/78 ANNEX V
**PERATURAN TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN YANG DIAKIBATKAN OLEH
 SAMPAH DARI KAPAL**

NO	PERATURAN	MT AA	MV.SM	Pelni	Pibhn
1	Peraturan 1: Definisi	✓	✓	✓	✓
2	Peraturan 2: Pemberlakuan	✓	✓	✓	✓
3	Peraturan 3: Pembuangan Sampah di Luar Kawasan Khusus	✓	✓	✓	✓
4	Peraturan 4: Persyaratan Khusus untuk Pembuangan Sampah	✓	✓	✓	✓
5	Peraturan 5: Pembuangan Sampah di Kawasan-Kawasan Khusus	✓	✓	✓	✓
6	Peraturan 6: Pengecualian	✓	✓	✓	✓
7	Peraturan 7: Fasilitas Penampungan	✓	✓	✓	x
8	Peraturan 8: Pengawasan Negara Pelabuhan terhadap Persyaratan Operasional	✓	✓	✓	✓
9	Peraturan 9: Plakat, Perencanaan Pengelolaan Sampah dan Penyimpanan Catatan Sampah	✓	✓	✓	✓

Tabel 4-3 Catatan Pengelolaan Sampah di Kapal (Appendix Lampiran V)

NO	URAIAN	MT AA	MV	PLN
1	Pendahuluan	✓	✓	✓
2	Sampah dan Pengelolaan Sampah	✓	✓	✓
3	Uraian sampah	✓	✓	✓
4	Penulisan Buku Catatan Sampah	✓	✓	✓
5	Tanda Terima.	✓	✓	✓
6	Jumlah Sampah	✓	✓	✓

PENUTUP

Kesimpulan

Walaupun kapal-kapal yang di survey telah memenuhi peraturan-peraturan yang ditegaskan di dalam MARPOL (*Marine Pollution*) 73/78 Annex V Tentang 'Pencegahan Pencemaran Oleh Sampah' yang mempersyaratkan *Garbage Management Plan* atau Prosedur

Penanganan Sampah di atas kapal namun demikian kontrol ketat dari regulator tetap harus dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan.

Saran

Fasilitas *reception facilities* di Pelabuhan Pantoloan perlu belum ada, seperti yang diamanatkan dalam Marpol 73/78 kepada regulator diharuskan membuat *reception facilities*.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- A. Boyle, *Impact of International Law and Policy*, dalam: Alan Boyle, ed., *Environmental Regulation and Economic Growth* (Clarendon Press, 1994), hlm. 179-182. Lihat juga: Alan Boyle dan Patricia Birnie, *International Law and the Environment*, Second Edition, (Oxford University Press, 2002), hlm. 92-95.
- Badan Koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.
- Craw, Alicia "Deep Seabed Mining: An urgent wake-up call to protect our oceans", (Greenpeace International: Amsterdam, 2013), hlm. 16.
- Elli Louka, *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness and World Order*, Hardjasoemanti, Koesnadi. 2001. *Hukum dan Lingkungan Laut di Indonesia*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta
- Hardjasoemanti, Koesnadi 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Cet.XIX, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 404.
- Louka, Elli *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order*, (United Kingdom : Cambridge University Press, 2006), hlm. 51.
- Philippe Sands. *Principles of International Environmental Law*.
- Putra, Ida Bagus Wyasa 2003, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, Cet. I, h. 45.)
- Santosa, Mas Achmad *et.al*, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) di bidang lingkungan hidup*, (Jakarta : ICEL), 1998, hlm. 18.
- Santosa, Mas Ahmad 1997, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, ICEL, (selanjutnya disebut Mas Ahmad Santosa II).
- Sugianto, Indro *Penegakan Hukum Lingkungan Aspek Keperdataan*, Dipresentasikan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Jumat, 15 November 2013.
- Indonesia, UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 27 Tahun 2007